

Film G30S PKI bakal Jadi Pertaruhan Jokowi,

Ini Sebabnya

RABU, 20 SEP 2017 13:51 | EDITOR : IMAM SOLEHUDIN



Presiden Joko Widodo (Dok.Jawapos)

JawaPos.com - Wacana pemutaran film G30S PKI jelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober mendatang menjadi pertaruhan bagi citra Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.

Kata dia, rencana penayangan Film Pengkhianatan G30S PKI, bakal memposisikan sikap Jokowi yang sesungguhnya.

"Ini bisa saja test on the water terhadap pemerintahan sekarang, ke arah mana posisi dan sikap pemerintah," ujarnya melalui pesan singkat yang diteima *JawaPos.com*, Senin (18/9).

Berita Terkait

- [MUI Setuju Film G30S PKI Dibuat Ulang, Tapi Ada Syaratnya](#)
- [Komentar Marcella Zalianty Soal Rencana Pembuatan Ulang Film G30S PKI](#)
- [MUI Minta Pemerintah Terbitkan Buku Sejarah Peristiwa G30S PKI](#)

Pangi menuturkan, jika Jokowi mendukung atau membiarkan penayangan film tersebut, tentu akan disambut baik oleh kalangan yang selama ini membenci komunis atau PKI.

Akan tetapi, Jokowi bakal mendapat citra buruk dari sebagian masyarakat yang menilai bahwa film tersebut sarat dengan kebohongan dan alat propaganda politik.

Pasalnya, film G30S PKI setelah reformasi atau jatuhnya rezim Soeharto tidak pernah lagi ditayangkan di televisi nasional. Padahal di era Soeharto, film tersebut wajib ditonton bagi masyarakat untuk memperlihatkan dan mengingatkan kekejaman dan bahaya laten komunis.

Namun jika Jokowi berani melarang pemutarannya, tentu ada kalangan yang mempertanyakan komitmen untuk 'menggebuk PKI' yang pernah dinyatakan Jokowi.

"Oleh karena itu, Jokowi sebaiknya tidak menanggapi rencana penayangan film Pengkhianatan G30S PKI secara berlebihan dan reaksioner," saran dia.

Pangi lantas mengulas pesan Presiden I Soekarno, soal jas merah (jangan melupakan sejarah), belakangan banyak generasi muda yang putus, alias tidak paham sejarah PKI di Indonesia.

Nah, pemutaran film tersebut berdampak positif dalam rangka mengingatkan kembali sejarah keganasan PKI di ibu pertiwi.

Karena itu, dia berpendapat, presiden maupun pemerintah jangan sampai menghalangi pemutaran film PKI. Pemutaran film itu sejalan dengan pernyataan Jokowi untuk 'gebuk PKI'.

Kalau tiba-tiba dilarang, kata dia malah bisa kontraproduktif dengan pernyataan presiden sebelumnya. "Ini bisa blunder dan bunuh diri politik bagi citra presiden apabila melarangnya," tegas lulusan S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) itu.

Namun, presiden dan pemerintah harus piawai dan terampil dalam mengelola isu-isu tentang PKI. "Kalau tidak bisa dimanajemen dengan baik, maka bisa dijadikan komoditas politik oleh lawan dan berpotensi menggerus dan membahayakan citra Jokowi," pungkas Pangi.

(dna/JPC)

Komentar Marcella Zalianty Soal

Rencana Pembuatan Ulang Film G30S PKI

RABU, 20 SEP 2017 12:43 | EDITOR : YUSUF ASYARI



Marcella Zalianty di XXI Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (19/9). (Dedi Yondra/JawaPos.com)

JawaPos.com - Marcella Zalianty memberi komentar terkait ide pembuatan ulang film doku-drama berjudul *Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI (1984)*. Aktris 37 tahun tersebut menilai wacana itu sah-sah saja dilakukan asalkan semua menyikapinya dengan dewasa.

"Kita semua harus dewasa dan bijaksana melihatnya kalau memang itu mau dibuat kembali. Kalau pun diperbaharui ya tidak ada salahnya. Kan orang membuat remake film apapun sah-sah saja, tapi berdasarkan latar belakang dan riset yang mendalam. Untuk bikin versi baru why not?" kata Marcella Zalianty di XXI Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (19/9).

Pemain film *Brownies* ini menambahkan, pembuatan ulang film *G30S PKI* nantinya harus dilakukan dengan riset mendalam. Sebab film tersebut erat kaitannya dengan sejarah dan juga rawan kontroversi. Menurutnya, sineas yang mengerjakan ulang film *G30S PKI* harus hati-hati dan sesuai fakta.

Berita Terkait

- [Ketua MPR: Isu PKI Jangan Ditunggangi Dong!](#)
- [MUI Minta Pemerintah Terbitkan Buku Sejarah Peristiwa G30S PKI](#)
- [Film G30S PKI Penuh Unsur Kekerasan untuk Anak](#)

"Versi apa pun menurut saya bisa saja dibuat, apabila filmmaker itu diberikan kebebasan untuk menginterpretasi. Tapi dengan catatan harus mempelajari kembali buku-buku dan riset yang mendalam tentang peristiwa tersebut," ucap Marcella.

"Jadi enggak asal bikin, karena ini ada kaitan sejarah. Enggak bisa asal bikin semanya hanya untuk kepentingan komersial. Harus melalui riset mendalam, baik dari pelaku-pelakunya atau dari buku-buku," imbuhnya.

Seperti diketahui, ide pembuatan ulang film *G30S PKI* sebelumnya datang dari Presiden Joko Widodo. Orang nomor satu di Indonesia berharap film sejarah tersebut bisa menyasar generasi milenial lewat versi baru.

"Akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian, bisa masuk ke generasi-generasi milenial," kata Presiden Jokowi di Kecamatan Dukun, Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9).

(ded/JPC)